



Demokrasi Dalam Pendidikan Islam

Kasful Anwar¹, Sya'roni Sya'roni², Anggun Feronika³, Si'in Si'in⁴

^{1,2,3,4} Uin Sultan Thaha Saifuddin Jambi

Korespondensi penulis: anggunferonika863@gmail.com

Abstract. *This paper will discuss democracy in Islamic education. The discussion on democracy in Islamic education starts from the most general definition of democracy, then democracy aims to provide equal opportunities for every student to achieve the highest level of education according to his abilities. As for what is meant by democracy is defined as an ideology or a way of life that prioritizes equal rights, obligations, and treatment for all citizens. In the context of education, democracy is shown by giving equal attention and effort to students, regardless of their natural ability, health or social status.*

Keywords : *Democracy, Education, Islam*

Abstrak. Tulisan ini akan membahas tentang demokrasi dalam pendidikan islam pembahasan mengenai demokrasi dalam pendidikan islam dimulai dari penegrtian demokrasi yaitu yang paling umum, kemudian demokrasi bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi setiap peserta didik untuk mencapai jenjang pendidikan yang setinggi-tingginya sesuai dengan kemampuannya. Adapun yang di maksud dengan demokrasi diartikan sebagai ideologi atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak, kewajiban, dan perlakuan bagi semua warga negara. Dalam konteks pendidikan, demokrasi ditunjukkan dengan memberikan perhatian dan usaha yang sama kepada peserta didik, tanpa memandang kemampuan alamiah, kesehatan, atau status sosialnya.

Kata Kunci : Demokrasi, Pendidikan, Islam

LATAR BELAKANG

Untuk mencapai kehidupan yang demokratis, berbagai bidang kehidupan harus ditempuh melalui proses demokrasi. Proses demokratisasi merupakan langkah terakhir menuju demokrasi. Dalam konteks pendidikan, pendidikan merupakan sarana dan peluang strategis untuk mewujudkan iklim demokrasi. Pendidikan demokrasi mengacu pada proses pembelajaran berkelanjutan yang mensosialisasikan, menginternalisasi, dan mengaktualisasikan konsep dan nilai-nilai demokrasi. Oleh karena itu, sangat penting bagi semua praktisi pendidikan untuk secara positif menyikapi perlunya mewujudkan sistem

pendidikan yang demokratis. Keberhasilan sistem demokratisasi pendidikan bergantung pada pemahaman, realisasi, dan dukungan semua warga negara terhadap proses ini.¹

Korelasi antara demokrasi dan pendidikan diakui secara luas di kalangan pendukungnya, karena pendidikan mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi dengan mengutamakan kesejahteraan anak. Pendidikan anak dianggap sebagai jalan untuk memanusiakan individu, menempatkan mereka di garis depan sistem pendidikan. Tujuan pendidikan adalah untuk menawarkan lingkungan yang mendukung yang mendorong pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal. Sistem pendidikan yang demokratis adalah sistem yang memberikan setiap siswa kesempatan yang sama untuk mencapai pendidikan sekolah menengah sesuai dengan kemampuannya. Pada hakekatnya, pendidikan demokrasi adalah penyelenggaraan pendidikan yang dapat diakses oleh semua anggota masyarakat dan diselenggarakan secara tidak memihak.²

Di zaman sekarang, di mana penduduk relatif lebih kompleks, demokrasi tidak bisa dikelola seperti di era polis. Dalam keadaan seperti itu, model yang paling memungkinkan adalah model representatif. Dalam model ini, meskipun individu tidak secara langsung berpartisipasi dalam memutuskan urusan mereka, kehadiran mereka sebenarnya diwakili oleh delegasi yang mereka pilih. Ini mengandung arti bahwa keinginan mereka secara hukum dilaksanakan melalui majelis dewan perwakilan. Sederhananya, hubungan antara politik dan rakyat dibangun melalui posisi rakyat sebagai pemilik hak kekuasaan tertinggi, menjadikan lembaga sipil sebagai otoritas tertinggi dalam sistem demokrasi.

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa demokrasi berfungsi sebagai wadah yang menjaga keseimbangan antara dominasi otoriter dan otonomi penduduk. Individu yang disinggung sebagai kekuatan koersif tentunya adalah mereka yang memenuhi syarat untuk terlibat dalam diskusi. Mereka tidak identik dengan individu yang memahami definisi "kebebasan". Sebagaimana diakui secara universal, istilah ini berlaku untuk semua kelompok, meskipun tetap harus mematuhi peraturan tertentu. Dalam konteks ini, Islam dengan struktur pendidikannya memenuhi peran tersebut.³

Pengajaran Islam memainkan peran penting dalam pertumbuhan Islam di Indonesia. Bentuk pendidikan ini telah berhasil mendorong pemikiran kritis, yang tampak dalam perilaku

¹ Ali Miftakhu Rosyad, *PARADIGMA PENDIDIKAN DEMOKRASI DAN PENDIDIKAN ISLAM DALAM MENGHADAPI TANTANGAN GLOBALISASI DI INDONESIA*, : Jurnal Pendidikan Islam Vol. 3 No 1 (2020).

² Irawan, Denny Hermawan, *KONSEPTUAL MODEL PENDIDIKAN DEMOKRATIS PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM*, Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 8 No. 2 (2019).

³ Imron Mustofa, *Pendidikan Islam Sebagai Institusi Politik Demokrasi Tertinggi di Indonesia*, Islamic Education Journal Vol 1, No 1, (2017).

dan tata krama kehidupan sehari-hari. Disposisi religius dan perilaku dinamis individu merupakan bukti bahwa pendidikan Islam telah mampu menghasilkan luaran yang patut dan berkualitas. Namun, terlepas dari kelebihan-kelebihan yang disebutkan di atas, masih ada beberapa kelemahan dalam pendidikan Islam yang perlu dibenahi. Salah satunya adalah kurangnya praktik demokrasi dalam pendidikan Islam.

KAJIAN TEORITIS

1. Demokrasi dalam Pendidikan Islam

Gaffar dalam Turham, Gagasan demokrasi pertama kali diperkenalkan oleh Herodotus kurang lebih 3000 tahun yang lalu di Mesir Kuno dan kemudian dikembangkan oleh para filosof Yunani pada masa klasik. Menurut Khuluq dalam Turham demokrasi berasal dari kata Yunani "demos" dan "cratos", di mana demos mengacu pada orang dan cratos mengacu pada pemerintahan atau otoritas. Intinya, ini berarti kekuasaan negara berada di tangan rakyat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi diartikan sebagai ideologi atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak, kewajiban, dan perlakuan bagi semua warga negara. Dalam konteks pendidikan, demokrasi ditunjukkan dengan memberikan perhatian dan usaha yang sama kepada peserta didik, tanpa memandang kemampuan alamiah, kesehatan, atau status sosialnya. Di Taman Siswa dijunjung tinggi sikap demokratis melalui pendekatan tutwuri handayani, yang mengakui hak anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan keunikannya.

Konsep demokrasi pendidikan mencakup gagasan tentang pengutamaan persamaan hak, kewajiban, dan perlakuan oleh pendidik terhadap peserta didik selama proses pembelajaran. Oleh karena itu, pendidikan demokrasi bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi setiap peserta didik untuk mencapai jenjang pendidikan yang setinggi-tingginya sesuai dengan kemampuannya. Hal itu dicapai melalui sistem pendidikan yang adil dan inklusif yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat Poerbakawatja dalam Turham. Dan menurut Dulay dalam Turham demokrasi pendidikan adalah pandangan hidup yang menekankan kesamaan hak, kewajiban, dan perlakuan bagi semua peserta didik dalam proses pendidikan yang berlangsung, termasuk pendidik dan pengelola pendidikan.⁴

Menurut dari perspektif etimologis, demokrasi bukanlah istilah yang diakui Islam. Sebaliknya, Islam menjunjung tinggi musyawarah sebagai landasan fundamental bagi

⁴ Turham AG, Wawasan Al Qur'an Tentang Lembaga Pendidikan, Jurnal Pendidikan Indonesia, Vol.02 No.09 (2021).

kehidupan sosial. Melalui konsep musyawarah itulah Islam memperkenalkan ide-ide yang berpusat pada proses partisipatif, kebebasan dan pilihan. Menurut Musa dala Iqbal dkk umat Islam secara kolektif telah mengakui bahwa prinsip musyawarah merupakan bagian integral dari ajaran Islam tentang urusan sosial dan pemerintahan. Musyawarah adalah komponen penting dalam menetapkan peraturan internal untuk setiap masyarakat. Oleh karena itu, setiap bangsa yang maju yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan, perdamaian, keamanan, dan kemakmuran warganya harus berpegang pada prinsip-prinsip musyawarah.

Pada hakekatnya, Islam mencakup prinsip-prinsip fundamental tentang keadilan, kejujuran, perbedaan, persatuan, ketergantungan, dan musyawarah, yang bersifat universal. Nilai-nilai yang mendasari ini bertujuan untuk membangun struktur sosial yang beradab. Dapat disimpulkan bahwa ajaran Islam dapat diterapkan secara universal dan mencakup prinsip-prinsip kunci dalam menjaga hubungan sosial, termasuk demokrasi. Djalil dalam Iqbal dkk manifestasi dari cita-cita demokrasi ini terlihat jelas dalam perlakuan yang sama dan prinsip-prinsip musyawarah dalam komunitas Muslim.⁵

Proses demokratisasi merupakan langkah terakhir menuju pembentukan masyarakat demokratis. Di bidang pendidikan, ia berfungsi sebagai sarana dan peluang strategis untuk menumbuhkan lingkungan yang demokratis. Pendidikan demokrasi mengacu pada proses sosialisasi, internalisasi, dan implementasi prinsip-prinsip dan nilai-nilai demokrasi yang berkesinambungan. Oleh karena itu, sangat penting bahwa semua praktisi pendidikan secara aktif bekerja untuk mencapai sistem pendidikan yang demokratis. Keberhasilan sistem ini tergantung pada pemahaman, pengakuan dan dukungan dari semua warga negara.⁶

2. Problematika Pendidikan Islam

Perjalanan pendidikan Islam di Indonesia selalu dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks dan beragam, mulai dari persoalan kontekstual-teoritis hingga operasional-praktis. Hal ini dibuktikan dengan adanya disparitas antara pendidikan Islam dengan bentuk pendidikan lainnya, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya, sehingga menimbulkan kesan bahwa pendidikan Islam itu inferior. Ironisnya, meski mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, sistem pendidikannya selalu tertinggal dari negara lain. Pendidikan Islam diakui dalam sistem pendidikan sebagai lembaga, mata pelajaran pendidikan agama yang diamanatkan untuk diajarkan dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi, dan

⁵ M. Iqbal, Paizaluddin, Sabriadi, *DEMOKRATISASI PENDIDIKAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM*, Jurnal Studi-studi Kesilaman, Vol.3 No.02 (2022).

⁶ Ali Miftakhu Rosyad, *PARADIGMA PENDIDIKAN DEMOKRASI DAN PENDIDIKAN ISLAM DALAM MENGHADAPI TANTANGAN GLOBALISASI DI INDONESIA*, Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 3 No 1 (2020).

seperangkat nilai yang terintegrasi ke dalam sistem pendidikan. Meskipun demikian, pendidikan Islam tidak terlepas dari permasalahan yang muncul di era global ini, yang dapat disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal.

3. Solusi Terhadap Problematika Pendidikan Islam

Untuk mengatasi masalah ini, diusulkan berbagai solusi, antara lain: (1) Pendidikan harus ditata sedemikian rupa sehingga memungkinkan peserta didik untuk secara alami dan kreatif mengembangkan potensinya dalam lingkungan yang menumbuhkan kebebasan, persatuan, dan tanggung jawab. Selain itu, pendidikan harus menghasilkan lulusan yang dapat memahami masyarakat dengan segala aspek yang berkontribusi terhadap keberhasilan atau penghambat kemajuan dalam kehidupan sosial. Pendekatan alternatif yang dapat ditempuh adalah memasukkan perspektif global dalam pendidikan.

Program pendidikan harus diubah, direkonstruksi, atau dimodernisasi untuk memenuhi tujuan dan harapan mereka. Pengembangan pemikiran intelektual yang kreatif dan dinamis dalam cahaya Islam harus dipercepat. Solusi utama adalah diferensiasi fungsional dari struktur dan sistem sosial melalui sekularisasi, yang menyiratkan industrialisasi sambil tetap mempertahankan agama.⁷

4. Impementasi Demokrasi Pendidikan Islam

a. Pendidikan *integralistik*

Merupakan model pedagogik yang menekankan pada aspek fundamental eksistensi, yaitu: pendidikan yang menitikberatkan pada rabbaniyah [spiritualitas], insaniyah [kemanusiaan], dan alamiyah [alam], sebagai komponen esensial untuk mencapai kehidupan yang berkecukupan dan mewujudkan Rahmatan. lil 'alamin, serta pendidikan yang mengakui manusia sebagai entitas holistik, meliputi dimensi fisik, spiritual, intelektual, emosional, dan sosial. Pendidikan integral bertujuan untuk membentuk individu [peserta didik] yang memiliki rasa integritas yang kuat, rasa syukur, dan keselarasan dengan kehendak ilahi, yang terintegrasi dalam dirinya, bebas dari konflik internal atau dikotomi, yang terhubung secara sosial, dan mampu berkontribusi pada persatuan. masyarakat yang selaras dengan alam, memanfaatkan sumber dayanya secara berkelanjutan dan bertanggung jawab, serta mengoptimalkan potensinya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oleh karena itu, pendidikan Islam dapat diartikan sebagai

⁷ Robiatul Awwaliyah, Hasan Baharun, *PENDIDIKAN ISLAM DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL (TELAAH EPISTEMOLOGI TERHADAP PROBLEMATIKA PENDIDIKAN ISLAM)*, Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA Vol. 19, No. 1, (2018)

pendidikan yang berpandangan teosentris, artinya berlandaskan teologi dan harus dikembangkan sesuai dengannya.

b. Pendidikan yang *humanistik*

Merupakan model pendidikan yang mengakui fitrah yang melekat pada manusia sebagai ciptaan Tuhan. Sebagai makhluk hidup, manusia harus berdaya untuk membangun, memelihara, dan mengembangkan kehidupannya. Pendidikan memainkan peran penting dalam proses humanisasi ini, termasuk menghormati hak asasi manusia yang mendasar seperti keadilan, kejujuran, dan kasih sayang. Tujuan pendidikan humanistik adalah mengembalikan peran dan fungsi hakiki manusia sebagai makhluk yang paling luar biasa. Melalui pendekatan ini, individu dapat mengembangkan rasa kemanusiaan yang menggantikan kecenderungan individualistis dan egoistik dengan belas kasih kepada orang lain. Ini termasuk merangkul nilai-nilai menghormati, memiliki, membantu, mencari kesamaan, dan mengakui perbedaan. Pada akhirnya, pendidikan humanistik bertujuan untuk menghasilkan individu yang mewujudkan sifat-sifat kemanusiaan tersebut dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur.

c. Pendidikan *pragmatik*

Pembelajaran yang mempersepsikan individu sebagai makhluk hidup yang senantiasa memerlukan sesuatu untuk menegakkan, mempertahankan dan meningkatkan keberadaannya baik jasmani maupun rohani, meliputi kognisi, emosi, realisasi diri, keadilan, dan kebutuhan ruhani samawi. Oleh karena itu, paradigma pendidikan pragmatis diantisipasi untuk menghasilkan individu praktis yang menyadari kebutuhan vital mereka, berempati terhadap masalah sosial-kemanusiaan, dan dapat membedakan antara keadaan dan kesulitan yang manusiawi dan tidak manusiawi.

d. Pendidikan yang berakar pada budaya

Ini adalah bentuk pendidikan dengan nilai-nilai sejarah, yang mencakup sejarah kemanusiaan secara keseluruhan dan sejarah budaya khusus untuk suatu bangsa, etnis atau masyarakat. Dengan mengadopsi kerangka pendidikan yang berlandaskan pada budaya, tujuannya adalah untuk membentuk individu-individu yang memiliki kepribadian yang kuat, harga diri, percaya diri, dan kemampuan untuk membangun peradaban berdasarkan warisan budaya mereka sendiri. Warisan ini akan menjadi warisan monumental dari nenek moyang mereka, bukan mengadopsi budaya bangsa lain. Namun, ini tidak berarti bahwa kita menentang modernitas, perubahan, atau reformasi. Sebaliknya, itu berarti bahwa kita harus hati-hati mengevaluasi dan mempertimbangkan

transformasi budaya dari sumber eksternal, dan membuat keputusan berdasarkan penalaran yang masuk akal.⁸

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Demokrasi pendidikan mencakup gagasan tentang pengutamaan persamaan hak, kewajiban, dan perlakuan oleh pendidik terhadap peserta didik selama proses pembelajaran. Oleh karena itu, pendidikan demokrasi bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi setiap peserta didik untuk mencapai jenjang pendidikan yang setinggi-tingginya sesuai dengan kemampuannya. Pada hakekatnya, Islam mencakup prinsip-prinsip fundamental tentang keadilan, kejujuran, pembedaan, persatuan, ketergantungan, dan musyawarah, yang bersifat universal. Nilai-nilai yang mendasari ini bertujuan untuk membangun struktur sosial yang beradab. Dapat disimpulkan bahwa ajaran Islam dapat diterapkan secara universal dan mencakup prinsip-prinsip kunci dalam menjaga hubungan sosial, termasuk demokrasi.

SARAN

Sebaiknya, perlu dikaji lagi terkait materi demokrasi dalam pendidikan islam yang berhubunga dengan Problematika pendidikan islam, solusi terhadap problematika pendidikan islam, impimentasi demokrasi pendidikan islam.

DAFTAR REFERENSI

- Ali Miftakhu Rosyad, PARADIGMA PENDIDIKAN DEMOKRASI DAN PENDIDIKAN ISLAM DALAM MENGHADAPI TANTANGAN GLOBALISASI DI INDONESIA, : Jurnal Pendidikan Islam Vol. 3 No 1 2020.
- Ali Miftakhu Rosyad, PARADIGMA PENDIDIKAN DEMOKRASI DAN PENDIDIKAN ISLAM DALAM MENGHADAPI TANTANGAN GLOBALISASI DI INDONESIA, Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 3 No 1 2020.
- Ayu Lestari, DEMOKRASI PENDIDIKAN ISLAM: KONSEPDAN IMPLEMENTASINYA, Jurnal An-Nur: Kajian Pendidikan dan Ilmu Keislaman Vol. 8, No. 02, 2022.
- Durhan, INTERNALISASI KONSEP DEMOKRASI DALAM PENDIDIKAN ISLAM, Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman, Vol 5, No 1, 2019
- Irawan, Denny Hermawan, KONSEPTUAL MODEL PENDIDIKAN DEMOKRATIS PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM, Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 8 No. 2 2019.

⁸ Ayu Lestari, DEMOKRASI PENDIDIKAN ISLAM: KONSEPDAN IMPLEMENTASINYA, Jurnal An-Nur: Kajian Pendidikan dan Ilmu Keislaman Vol. 8, No. 02 (2022).

- Imron Mustofa, Pendidikan Islam Sebagai Institusi Politik Demokrasi Tertinggi di Indonesia, *Islamic Education Journal* Vol 1, No 1, 2017.
- M. Iqbal, Paizaluddin, Sabriadi, DEMOKRATISASI PENDIDIKAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM, *Jurnal Studi-studi Kesilaman*, Vol.3 No.02 2022.
- Robiatul Awwaliyah, Hasan Baharun, PENDIDIKAN ISLAM DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL (TELAAH EPISTEMOLOGI TERHADAP PROBLEMATIKA PENDIDIKAN ISLAM), *Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA* Vol. 19, No. 1, 2018.
- Turham AG, Wawasan Al Qur'an Tentang Lembaga Pendidikan, *Jurnal Pendidikan Indonesia*, Vol.02 No.09 2021.